



RENCANA KERJA 2025



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan penuh rasa syukur, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan karunia-Nya yang melimpah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebuah langkah yang strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BKAD Kabupaten Luwu Timur, sebagai perangkat daerah penunjang pemerintah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, berkomitmen untuk menyusun Renja ini dengan cermat dan terencana. Analisis kebutuhan dan strategi yang dilakukan mengacu pada rencana pembangunan daerah, sehingga BKAD dapat memastikan bahwa prioritas dan strategi yang diusulkan dalam Renja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Kami berharap Renja BKAD tahun 2025 dapat menjadi panduan yang kokoh dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, diharapkan Renja ini akan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Luwu Timur.

Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam proses penyusunan Renja ini, kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya dalam setiap langkah kita untuk kemajuan daerah ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malili, 01 Juni 2024

KEPALA BKAD Kab. Luwu Timur



Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M

Pkt. Pembina Utama Muda

Nip : 197008142002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BKAD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BKAD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKAD	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD	48
3.3 Program dan Kegiatan BKAD	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKAD	53
BAB V PENUTUP	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta prosedur evaluasi Rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta perubahan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Luwu Timur bertugas sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan rencana kerja tahun 2024 sebagai langkah tahunan dari Rencana Strategis 5 tahun Badan Keuangan Daerah dan Aset daerah.

Pada tahun 2025, yang merupakan tahun keempat implementasi Rencana Strategis (Renstra), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun program kegiatan, indikator kinerja, dan alokasi dana dalam rencana kerja sejalan dengan prioritas program pada rancangan awal RKPD tahun 2024 sebagai bagian dari perangkat daerah yang mendukung tata kelola keuangan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahap sebagai berikut:

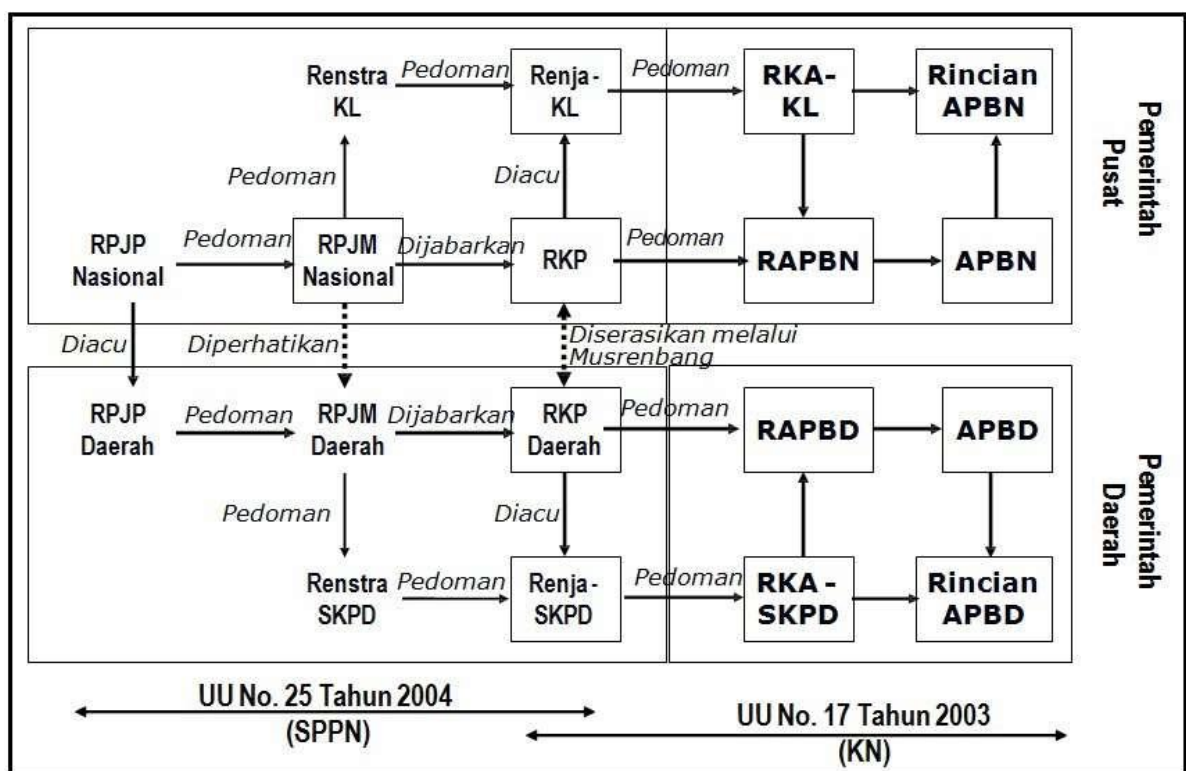
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti arahan yang tertera

dalam Rencana Strategis. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset daerah dapat dilakukan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus utama pada pengkajian kondisi eksisting Badan Keuangan dan Aset daerah, evaluasi pencapaian Rencana Kerja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset daerah. Hubungan Renja Perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan keuangan dan Aset Daerah untuk pelaksanaan kerja 1 tahun;
- b. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan;

- c. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 sebagai landasan operasional unsur pimpinan dan staf dalam pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun dengan kerangka sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- f. Menyusun penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP)

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BKAD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BKAD, rencana Kerja BKAD, keterkaitan antara Renja BKAD dengan Dokumen RKPD dan Renstra BKAD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BKAD Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKAD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BKAD, serta susunan garis besar isi dokumen setiap BAB serta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKAD DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja BKAD Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD.

Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BKAD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

Menjelaskan dan menyajikan hasil analisis kinerja pelayanan BKAD serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi yang dianggap penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BKAD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKAD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKAD

Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD.

3.3 Program dan Kegiatan BKAD

Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BKAD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai salah satu instansi yang berperan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam kegiatannya harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra pada tahun lalu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BKAD dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan aset daerah.

Pada tahun lalu, pelaksanaan Renja BKAD telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, BKAD juga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa BKAD telah berhasil mengelola keuangan dan aset daerah dengan baik.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih dan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2025.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Tahun 2023		
							Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3			
1					WAJIB				
1	05				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	84,32%	84,32%
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat	100%	100%	100,00%
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00%
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00%
1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100,00%
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	100,00%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100,00%
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	28	100,00%
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	4	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Tahun 2023		
							Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00%
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19	19	100,00%
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100,00%
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100,00%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	90,2%	90,20%
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	2	100,00%
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	700	569	81,29%
1	05	02	01	0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66	59	89,39%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	100%	93,45%	93,45%
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Tahun 2023		
							Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	#DIV/0!
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4	4	100,00%
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	5	5	100,00%
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144	141	97,92%
1	05	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	2	100,00%
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	160	91,43%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	99%	99,00%
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	23	95,83%
1	05	01	2.07	0006	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	22	100,00%
1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	100,00%
1	05	01	2.07	0010	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5	5	100,00%
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100,00%
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100,00%
1	05	01	2.08	0002	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Tahun 2023		
							Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	05	01	2.08	0004	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	87,57%	87,57%
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	9	90,00%
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	55	40	72,73%
1	05	01	2.09	0009	pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	100,00%
1	05	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	97%	99,58%	102,66%
1	05	02	2.01		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	11	10	110%
1	05	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2	2	100,00%
1	05	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2	2	100,00%
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59	59	100,00%
1	05	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59	59	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Tahun 2023		
							Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	05	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	110	110	100,00%
1	05	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	100,00%
1	05	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4	6	150,00%
1	05	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	26	26	100,00%
1	05	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	4	100,00%
1	05	02	2.01	0013	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah	236	236	100,00%
1	05	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100,00%
1	05	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	12	12	100,00%
1	05	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	12	100,00%
1	05	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	240	240	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Tahun 2023		
							Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	05	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana	97%	100%	103,09%
1	05	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas	12	12	100,00%
1	05	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	236	236	100,00%
1	05	02	2.03	0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semester	18	18	100,00%
1	05	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah uang terkonsolidasi	18	18	100,00%
1	05	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	2	2	100,00%
1	05	02	2.03	0006	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	1	100,00%
1	05	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	2	2	100,00%
1	05	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah/kota (Orang)	320	320	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Tahun 2023		
							Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	05	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat (Persen)	100%	100%	100,00%
1	05	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan (Laporan)	3	3	100,00%
1	05	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak (Laporan)	1	1	100,00%
1	05	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik	91%	91%	100,00%
1	05	03	2.01		Pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan BMD Perangkat Daerah yang tertata dengan baik (Perangkat daerah)	59	57	96,61%
1	05	03	2.01	0001	penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun (Dokumen)	1	1	100,00%
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah (Dokumen)	2	2	100,00%
1	05	03	2.01	0005	penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah (Laporan)	1	1	100,00%
1	05	03	2.01	0006	inventarisasi barang milik daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) barang milik daerah (Laporan)	1	1	100,00%
1	05	03	2.01	0007	pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah (Laporan)	2	2	100,00%
1	05	03	2.01	0008	penilaian barang milik daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah (Laporan)	2	2	100,00%
1	05	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah (Dokumen)	4	4	100,00%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target dan Realisasi Tahun 2023		
							Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	05	03	2.01	0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah (Laporan)	118	118	100,00%
1	05	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun (Laporan)	1	1	100,00%
1	05	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun (Orang)	118	118	100,00%
1	05	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah/kota (Orang)	100%	84,32%	84,32%

2.2 Analisis Kinerja BKAD.

BKAD Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada Misi 4 yaitu “Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik” dengan tujuan “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani” dan sasarannya “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan” maka dalam pelaksanaan tugas BKAD untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut BKAD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran Daerah;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan Daerah;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi BKAD dimaksud, secara rinci jenis pelayanan yang diberikan, meliputi:

1. Sekretariat
 - a. Pelayanan Bantuan Keuangan Desa
 - b. Pelayanan Dana Darurat dan Mendesak
 - c. Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah
2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

- a. Pelayanan Verifikasi RKA
 - b. Pelayanan Verifikasi DPA
 - c. Pelayanan Penyusunan APBD
 - d. Pelayanan Penyusunan Perubahan APBD
 - e. Pelayanan Penyusunan KUA dan PPAS
 - f. Pelayanan Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah
3. Bidang Perbendaharaan Daerah
 - a. Pelayanan penerbitan SP2D
 - b. Pelayanan Administrasi Gaji dan Tunjangan
 - c. Pelayanan Dana Transfer
4. Bidang Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Pelayanan Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - b. Pelayanan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD
 - c. Pelayanan Rekonsiliasi dan Verifikasi aset Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
 - c. Pelayanan Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Pelayanan Pengamanan BMD
 - b. Pelayanan Penghapusan BMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dengan menggunakan indikator kinerja, organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja mereka, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan target, yang dapat dilihat pada pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Mewujudkan pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama rancangan perda dan rancangan perbup APBD antara kepala daerah dan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%
			Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi	100%

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Capaian Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, adapun rumusan kebijakan dalam tupoksi BKAD meliputi:

- a. Kebijakan perencanaan anggaran daerah;
- b. Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- c. Kebijakan perbendaharaan daerah; dan
- d. Kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

Analisis Kinerja berdasarkan kebijakan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang terdiri dari Indikator Kinerja dan Indikator Sasaran. Target dari Indikator Kinerja Tujuan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Target Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel 2.3 diatas, Tujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel dengan Indikator Kinerja Tujuan adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Opini Wajar tanpa pengecualian adalah menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pada Tabel 2.4 berikut disajikan capaian realisasi Indikator Kinerja Tujuan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.4
Capaian Realisasi dari Target Indikator Kinerja Tujuan

OPINI BPK	CAPAIAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kab. Luwu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI

Pada Indikator Kinerja Tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya baik target dan capaian realisasinya pada tahun-tahun sebelumnya, maka perlu diuraikan juga Analisis kinerja pelayanan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaran yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Tabel Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama rancangan perda dan rancangan perbup APBD antara kepala daerah dan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

Pada tabel 2.5 Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari dua indikator Sasaran yaitu : *Pertama*, Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama rancangan perda dan rancangan perbup APBD antara kepala daerah dan DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan target 100% dan *Kedua*, Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi dengan target 100%. Penetapan target jumlah hari kerja pada Indikator Sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai posisi yang penting dalam tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Luwu timur. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menyebutkan Pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023

masih terdapat Isu-isu Penting sebagai berikut:

a. Kekuatan dan kelemahan

Tabel Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi 2023

No	Kekuatan	Kelemahan
1	Komitmen dan kemampuan SDM yang baik terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah pegawai yang tersedia untuk mengelola keuangan dan aset daerah tidak sebanding dengan beban kerja yang harus ditangani.
2	Terdapat beberapa aplikasi penunjang dalam optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Diperlukan penyesuaian terhadap SIPD-RI sebagai aplikasi baru pengganti SIPD penunjang pengelolaan keuangan daerah
3	Terdapat gedung bangunan dan fasilitas kantor	Belum Optimalnya interior ruangan rapat dalam menunjang kegiatan
4	Terdapat kewenangan terkait perencanaan penganggaran daerah,	Adanya penambahan tenaga PPPK yang perlu diakomodir dalam penganggaran
5	Terdapatnya kewenangan terkait perbendaharaan daerah,	Adanya kebutuhan mendesak mengenai kelengkapan informasi data kepegawaian untuk seluruh ASN yang akurat untuk penerapan SIM Gaji berbasis Web.
6	Terdapatnya kewenangan terkait Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,	Masih minimnya literasi pelaksanaan standar akuntansi pada SDM penyusun laporan keuangan
7	Terdapatnya kewenangan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah	Masih adanya barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik

b. Ancaman dan Peluang

Tabel Ancaman dan Kekuatan yang dihadapi 2023

No	Ancaman	Peluang
1	Kurang efektifnya pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah.	Pengembangan SDM lebih lanjut dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah
2	Perlunya Koordinasi intensif terkait penerapan SIPD-RI	Pelaksanaan koordinasi intensif dapat melalui zoom meeting

No	Ancaman	Peluang
3	Penyelenggaraan rapat dalam rangka menunjang kegiatan belum efektif	Melakukan peningkatan interior ruangan rapat dalam rangka menunjang kegiatan
4	Aturan mengenai PPPK masih belum dipahami sepenuhnya sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam penganggaran atau penerapan yang tidak efektif.	Melakukan peningkatan koordinasi terkait penganggaran PPPK.
5	Ancaman terkait akurasi dan keandalan data kepegawaian	Pelaksanaan koordinasi terkait akurasi dan keandalan data kepegawaian
6	SDM penyusun laporan keuangan kurang berkembang	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan SDM terkait literasi akuntansi pelaporan keuangan daerah
7	ancaman terhadap kehilangan atau kerusakan barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah dengan inventarisasi yang lebih baik

c. Formulasi dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah

1. Kekurangan SDM dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Kebutuhan penyesuaian terhadap aplikasi baru, SIPD-RI.
3. Interior ruangan rapat yang belum optimal.
4. Penambahan tenaga PPPK yang membutuhkan pengakomodasian dalam penganggaran.
5. Kebutuhan mendesak akan data kepegawaian yang akurat.
6. Minimnya literasi akuntansi pada SDM penyusun laporan keuangan.
7. Masih adanya barang milik daerah yang belum terinventarisasi dengan baik.

Dengan mempertimbangkan isu-isu yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, langkah-langkah tindak lanjut yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM

Perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih lanjut dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan serta aset daerah

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

2. Penyesuaian terhadap aplikasi baru

Diperlukan penyesuaian terhadap aplikasi baru, SIPD-RI, sebagai pengganti SIPD untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini meliputi pelatihan penggunaan aplikasi dan penyesuaian proses kerja.

3. Peningkatan fasilitas ruang rapat

Interior ruangan rapat perlu dioptimalkan untuk mendukung kegiatan yang efektif dan produktif.

4. Koordinasi penganggaran terkait PPPK

Perlu ditingkatkan koordinasi terkait penganggaran untuk memastikan penambahan tenaga PPPK dapat diakomodir secara efektif dan efisien.

5. Peningkatan akurasi dan keandalan data kepegawaian

Koordinasi yang intensif diperlukan untuk memastikan akurasi dan keandalan data kepegawaian guna mendukung penerapan SIM Gaji berbasis Web dengan tepat.

6. Sosialisasi dan pembinaan literasi akuntansi

Perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan literasi akuntansi pada SDM yang menyusun laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

7. Inventarisasi barang milik daerah

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah dengan melakukan inventarisasi yang lebih baik guna mencegah kehilangan atau kerusakan barang yang belum terinventarisasi dengan baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagaimana tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Malili	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,30	57.438.725.701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Malili	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,5%	65.2195.914.926	
a.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat (%)	100	204.333.500	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat (%)	100%	204.333.500	
1.	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Malili	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	3	98.007.500	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Malili	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2	98.007.500	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	3.705.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Malili	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2	3.705.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								SKPD (Dokumen)			
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Malili	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (dokumen)	2	3.062.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Malili	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD (dokumen)	2	3.062.500	
6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	99.558.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Malili	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	99.558.500	
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	98	54.529.439.251	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	98	61.988.207.726	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malili	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	46	54.085.114.701	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Malili	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	30	61.517.842.726	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Malili	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7000	108.574.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Malili	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	108.574.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Malili	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		89.429.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Malili	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	89.429.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Malili	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19	246.321.550	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Malili	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19	272.361.550	
c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	98	17.090.000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	98	17.090.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Malili	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	17.090.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Malili	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		17.090.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
e	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	692.488.050	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	607.774.800	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Malili	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	30 Paket	86.700.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Malili	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	30 Paket	86.700.000	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Malili	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (%)	12	24.550.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Malili	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (%)	2	60.163250	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	450	52.125.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	230	52.125.400	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	44	555.649.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	50	555,649.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
F	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah (%)	95	815.962.400	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Malili	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah (%)	95	820.302.400	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Malili	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	4	6.950.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Malili	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)	4	6.950.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malili	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	22	12.827.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Malili	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	4	12.827.400	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malili	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	3	38.625.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Malili	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	5	38.625.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	132	17.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Malili	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	144	18.480.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								disediakan (Dokumen)			
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Malili	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	6250	38.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Malili	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	2	42.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malili	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250	701.420.000	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Malili	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	701.420.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Malili			604.300.000					576.390.000	
1	Pengadaan Mebel	Malili	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	80.200.000	Pengadaan Mebel	Malili	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	65.150.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Malili	Jumlah unit peralatan da mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	171.100.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan da mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	158.240.000	
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Malili	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	300.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Malili	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	300.000.000	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Malili	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau	3 Unit	53.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Malili	Jumlah unit sarana dan prasarana	3 Unit	53.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		bangunan lainnya yang disediakan			Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			
h	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Malili	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	261.852.500	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH	Malili	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	323.125.500	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Malili	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	24	92.652.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Malili	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	92.652.500	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Malili	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	36	128.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Malili	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12	128.400.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malili	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	5	40.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Malili	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	44.160.000	
i	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan	95	313.260.000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	Malili	Persentase Barang Milik Daerah penunjang	95	658.690.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Malili	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dins Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21	51.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Malili	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dins Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	83.800.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Malili	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	69	44.460.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Malili	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	66	44.460.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malili	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2	217.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Malili	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	1	220.000.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96,70	451.408.484.599	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96,70	343.490.687.495	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Malili	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	10	102.714.553.749	KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Malili	Waktu penyusunan Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Minggu)	10	1.436.204.300	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	1	101.249.250.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	2	101.249.950	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Malili	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun (dokumen)	1	92.174.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Malili	Jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun (dokumen)	2	92.174.400	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Malili	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)		17.226.449	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Malili	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	59	17226.449	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Malili	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	1	19.022.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Malili	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	59	19.022.500	
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Malili	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi (dokumen)	1	19.094.500	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Malili	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang	71	19.094.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD		diverifikasi (dokumen)			
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Malili	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (dokumen)	2	641.760.950	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Malili	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (dokumen)	2	641.760.950	
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Malili	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen)	2	514.756.800	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Malili	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (dokumen)	4	514.756.800	
8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Malili	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dokumen)	15	83.808.250	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Malili	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dokumen)	34	83.808.250	
9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Malili	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan	4	57.223.800	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Malili	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Perencanaan	4	57.223.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Anggaran Belanja Daerah (dokumen)					Anggaran Belanja Daerah (dokumen)			
10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota (orang)		20.236.500	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penganggaran daerah kabupaten/kota (orang)	236	20.356.500	
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Malili	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	97	711.789.600	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Malili	Persentase pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)	97	711.789.950	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)		129.999.950	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	129.999.950	
3	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan		506.789.900	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi	12	506.789.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dana Transfer Lainnya		Dana Transfer lainnya (dokumen)			Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (dokumen)			
6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Malili	jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		74.999.750	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Malili	jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	240	74.999.750	
c	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)	97	1.216.663.250	KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)	97	1.225.466.500	
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Malili	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	18.500	75.934.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Malili	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	12	75.934.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)					Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)			
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		55.425.650	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	236	55.425.650	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Malili	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	16	315.109.700	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Malili	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	18	315.109.700	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Malili	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi (Laporan)	12	117.116.400	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Malili	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi (Laporan)	18	117.116.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	489.154.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	18	489.154.000	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Malili	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	1	-	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Malili	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen)	1	-	
8	Penyusunan Kebijakan dan	Malili	Jumlah Kebijakan dan Panduan		32.164.500	Penyusunan Kebijakan dan	Malili	Jumlah Kebijakan dan	2	32.164.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			
9	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (laporan)		131.759.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (laporan)	320	131.759.000	
d	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (%)	95	346.765.478.000	KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Malili	Persentase besaran Bantuan Keuangan dan Dana Desa yang tersalurkan (%)	96	340.117.227.295	
3	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	127	343.265.478.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	3	343.265.478.000	
4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Malili	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	1	3.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Malili	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan	1	3.500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Mendesak (Laporan)					dan Mendesak (Laporan)			
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	58	1.248.594.300	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Persentase Barang Milik Daerah yang terkelola dengan baik (%)	93	1.248.594.330	
a.	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	90	1.248.594.300	KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Malili	Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tertata dengan baik	58	1.248.594.330	
1	Penyusunan Standar Harga	Malili	Jumlah Standar Harga yang disusun (Dokumen)	2	35.196.900	Penyusunan Standar Harga	Malili	Jumlah Standar Harga yang disusun (Dokumen)	1	35.196.900	
3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	30.682.700	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	30.682.700	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	185.630.950	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	185.630.950	
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	2	62.974.300	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang	1	62.974.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Milik Daerah (Laporan)			
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	2	-	Pengamanan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (laporan)	2	-	
8	Penilaian Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	75.114.500	Penilaian Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	2	75.114.500	
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan , Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (dokumen)	90	644.975.500	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (dokumen)	4	644.975.500-	
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Malili	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan	-	-	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	Malili	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka	118	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Laporan Barang Milik Daerah		laporan barang milik daerah (laporan)			Laporan Barang Milik Daerah		penyusunan laporan barang milik daerah (laporan)			
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)	-	-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Malili	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)	1	-	
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	320 Org	214.019.450	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Malili	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2	214.019.450	
	Jumlah				405.983.632.175	Jumlah				416.483.632.175	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dalam tata kelola keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola keuangan daerah.

Badan Keuangan dan Aset daerah kabupaten Luwu Timur memberikan Informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi anggaran terhadap rancangan anggaran program kegiatan yang diusulkan oleh OPD lingkup Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2025 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; 2) Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi; 3) percepatan infrastruktur IKN; 4) reformasi pengelolaan sampah; 5) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan; 6) menciptakan lapangan kerja berkualitas; 7) menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan;

Untuk ikut mendorong pelaksanaan arah pembangunan nasional tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar

masyarakat.

Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai Induk dalam Rencana Pembangunan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJMD harus terintegrasi dengan RPJMN. walaupun dimungkinkan adanya, perbedaan prioritas pembangunan menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis yang bertujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023 mengacu kepada Misi 4 yakni terciptanya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dengan arah kebijakan terciptanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Adapun Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Luwu Timur

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase ketepatan waktu persetujuan bersama ranperda dan ranperbup APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan 2. Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK RI sesuai Standar Akuntansi

Sumber : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.

Dalam Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Badan Keuangan yang disusun terintegrasi dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset daerah sebagai OPD bertugas

dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah lingkup Kabupaten Luwu Timur sebanyak 3 Program, 13 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
6.1	Pengadaan Mebel
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
No	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
1.10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer
2.3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan atas SP2D dengan instansi terkait

3 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 3.2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan beban
- 3.3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- 3.4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- 3.6 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 3.7 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota

4 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

No PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- 1.1 Penyusunan Standar Harga
- 1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 1.4 Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 1.5 Penilaian Barang Milik Daerah
- 1.6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 1.7 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah (RENSTRA BKAD) Tahun 2021-2026. Rencana Kerja menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat setiap tahun. Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas 3 program, 13 kegiatan dan 59 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 416.483.632.175,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target, Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,5%	65.195.914.926	APBD
a.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	204.333.500	APBD
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	98.007.500	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.705.000	APBD
3)	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.062.500	APBD
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	99.558.500	APBD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98%	61.988.207.726	APBD
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	61.517.842.726	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	108.574.000	APBD
3)	Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan	89.429.000	APBD
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	272.361.550	APBD
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98%	17.090.000	APBD
1)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	17.090.000	APBD
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	607.774.800	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		86.700.000	APBD
1)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	98 Persen	60.163.250	APBD
2)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	230 orang	52.125.400	APBD
3)	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 orang	555.649.400	APBD
f	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	820.302.400	APBD
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	6.950.000	APBD
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	12.827.400	APBD
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	38.625.000	APBD
4)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	144 Dokumen	18.480.000	APBD
5)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	42.000.000	APBD
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175 Laporan	701.420.000	APBD
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	323.125.500	APBD
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	78.325.500	APBD
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	204.000.000	APBD
3)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	40.800.000	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		576.390.000	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
	Pengadaan Mebel	5 Unit	65.150.000	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	158.240.000	APBD
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	300.000.000	APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	53.000.000	APBD
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	658.690.000	APBD
1)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10 unit	56.000.000	APBD
2)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	66 unit	62.690.000	APBD
3)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	540.000.000	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	97%	343.490.687.495	APBD
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10 Minggu	1.436.204.300	APBD
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	101.249.300	APBD
2)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	92.174.400	APBD
3)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	59 Dokumen	17.226.450	APBD
4)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	59 Dokumen	19.022.650	APBD
5)	Koodinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	71 Dokumen	19.022.000	APBD
6)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	520.561.100	APBD
7)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	504.256.850	APBD
8)	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	34 Dokumen	85.231.750	APBD
9)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	57.235.800	APBD
10)	Pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	236 Orang	20.224.000	APBD

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
b)	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	97%	711.789.500	APBD
1)	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	12 Laporan	129.999.950	APBD
2)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, supervise, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 dokumen	506.789.800	APBD
3)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	240 dokumen	74.999.750	APBD
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	97%	1.225.466.500	APBD
1)	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	75.936.000	APBD
2)	Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	236 Dokumen	55.425.750	APBD
3)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran	18 Laporan	279.469.700	APBD
4)	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	18 Laporan	115.076.700	APBD
5)	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	2 Dokumen	505.754.000	APBD
6)	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	29.879.750	APBD
7)	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	2 dokumen	32.164.750	APBD
8)	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	320 orang	131.759.850	APBD
d	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	96%	340.117.227.295	

	PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2025 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
3)	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	3 Laporan	336.617.227.295	APBD
4)	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	3.500.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	93%	1.248.594.330	APBD
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	58 Perangkat Daerah	1.248.594.330	APBD
1)	penyusunan standar harga	1 Dokumen	35.196.900	APBD
2)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.682.700	APBD
3)	penatausahaan barang milik daerah	1 Laporan	185.630.980	APBD
4)	inventarisasi barang milik daerah	1 Laporan	62.974.300	APBD
5)	penilaian barang milik daerah	2 Laporan	75.114.500	APBD
6)	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	4 Dokumen	644.975.500	APBD
7)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang	214.019.450	APBD
JUMLAH			416.483.632.175	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 merupakan dokumen penting yang memuat arah kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Dokumen Renja tidak hanya menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun juga berfungsi sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa setiap capaian kinerja sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Renja 2025, diharapkan setiap bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur yang tersedia. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah.

Penyusunan Renja ini juga berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap tahapan pelaksanaan kegiatan akan diawasi dan dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui laporan triwulan tidak hanya bertujuan untuk menilai capaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang mungkin dihadapi sehingga dapat segera diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Selaras dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2025 ini juga diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Peran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola keuangan dan aset daerah sangat penting dalam menciptakan stabilitas fiskal daerah yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada sinergi yang terbangun antara bidang-bidang di internal Badan Keuangan dan Aset Daerah serta kerjasama dengan perangkat daerah lainnya. Keterpaduan langkah dan komunikasi yang efektif akan menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang kompleks dan dinamis.

Selain itu, peran serta stakeholders dan pemangku kepentingan juga sangat diperlukan. Partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait, baik dari unsur pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Dengan adanya dukungan dan komitmen bersama, diharapkan permasalahan yang ada dapat diatasi dan hasil pembangunan yang optimal dapat tercapai.

Tanggung jawab untuk mewujudkan Renja ini menjadi nyata bukan hanya terletak pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, tetapi juga pada setiap individu yang berperan di dalamnya. Komitmen, integritas, serta etos kerja yang tinggi dari seluruh aparatur di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur menjadi faktor penentu kesuksesan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh bidang dapat menjadikannya sebagai pedoman utama dalam melaksanakan program dan kegiatan. Semoga seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik di masa mendatang

Malili, 01 Juni 2024

KEPALA BKAD Kab. Luwu Timur



Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M
Pkt: Pembina Utama Muda
Nip: 197008142002121006